

**a. STUDI EVALUASI KEBIJAKAN PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PROGRAM PENGEMBANGAN KECAMATAN (PNPM-PPK) DI KECAMATAN SURADADI KABUPATEN TEGAL TAHUN 2007**

**b. Disusun Oleh Parikha (D2B 004 119)**

**c. Abstraksi**

Dalam rangka menanggulangi kemiskinan di wilayah pedesaan pemerintah telah membuat suatu kebijakan yaitu Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat-Program Pengembangan Kecamatan (PNPM-PPK) merupakan program penanggulangan kemiskinan yang mempunyai tujuan umum untuk mempercepat upaya penanggulangan kemiskinan berdasarkan pengembangan kemandirian masyarakat melalui peningkatan kapasitas masyarakat, pemerintah lokal, serta penyediaan sarana prasarana sosial dasar dan ekonomi.

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan PNPM-PPK di Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal pada tahun 2007 dapat mencapai tujuan utamanya yaitu mengentaskan masyarakat miskin dari belenggu kemiskinan. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif evaluatif yang mencoba menggambarkan pelaksanaan program. Sedangkan analisa data menggunakan metode kualitatif dengan menganalisa data melalui penalaran sehingga dapat diketahui keefektifitasan dari setiap indikator. Ketujuh indikator yang digunakan sesuai dengan Petunjuk Teknis Operasional yang dikeluarkan oleh Ditjen PMD dan Sekretariat Pembina PPK Konsultan Manajemen Pusat.

Sedangkan sampel yang digunakan dalam penelitian ini hanya ada dua orang narasumber sebagai key person yang banyak mengetahui jalannya pelaksanaan program

PNPM-PPK ini. Informasi yang didapat dilakukan dengan wawancara secara mendalam kepada narasumber.

Setelah dilakukan penelitian dapat disimpulkan bahwa secara umum proses kegiatan PNPM- PPK di Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal pada tahun 2007 telah berjalan dengan lancar dan sesuai dengan prosedur yang ada. Namun keberhasilan proses tersebut tidak diiringi dengan keberhasilan tujuan utamanya yaitu pengentasan kemiskinan. Karena kenyataan di lapangan hanya sebagian masyarakat yang dapat memanfaatkan bantuan sehingga dapat meningkatkan penghasilannya. Dengan demikian PNPM-PPK kurang berhasil dalam mengentaskan kemiskinan di wilayah pedesaan.

Key words: kemiskinan, desa, pemberdayaan.

#### **d. Pendahuluan**

Dalam rangka mengentaskan kemiskinan, pemerintah telah merumuskan suatu proyek yang diharapkan dapat dijalankan secara terus-menerus yaitu Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Pengembangan Kecamatan (PNPM-PPK) yang menjadi bagian dari upaya menanggulangi krisis dan meningkatnya angka kemiskinan khususnya di wilayah pedesaan. Program pengentasan kemiskinan seperti PNPM-PPK yang sedang dilaksanakan tersebut merupakan upaya-upaya memandirikan masyarakat lewat perwujudan potensi kemampuan yang mereka miliki.

Kecamatan Suradadi merupakan salah satu Kecamatan di Kabupaten Tegal yang mendapatkan bantuan dari PNPM-PPK sejak tahun 2003. Kecamatan Suradadi merupakan salah satu kecamatan dengan tingkat kemiskinan yang masih relatif tinggi yaitu sekitar 20,41% dari total kepala keluarga yang ada di kecamatan Suradadi yaitu 20947 jiwa pada tahun 2006. Salain itu Kecamatan Suradadi yang mencakup 11 desa, dua

diantaranya adalah termasuk dalam kategori desa tertinggal yaitu desa Harjasari dan desa Purwahamba. Sebagian wilayahnya merupakan daerah pesisir pantai utara yang rawan bencana banjir, sebagian wilayahnya merupakan dataran. Hal ini memunculkan keberagaman dalam mata pencaharian penduduknya namun yang paling mendominasi adalah sebagai petani dan nelayan yaitu mencapai 20.355 jiwa atau sekitar 68,19 %. Sebagai petani pun tidak semuanya menggarap lahan sendiri, namun sebagian besar menggarap tanah milik orang lain dengan sistem bagi. Begitu pula dengan nelayan banyak yang masih menggunakan perahu sewaan dalam mencari ikan dan penghasilannya tidak tetap. Seperti di ketahui bahwa petani dan nelayan merupakan simbol kemiskinan bagi wilayah pedesaan. Dengan alasan yang demikian kiranya Kecamatan Suradadi pantas mendapatkan bantuan PNPM-PPK ini yang diperuntukkan bagi kecamatan yang masih tinggi tingkat kemiskinannya.

Dan sepanjang berlangsungnya PNPM-PPK telah ditemukan beberapa indikasi bahwa Kecamatan Suradadi memang termasuk dalam kategori kecamatan bermasalah berdasarkan temuan BPKP tahun 2006.

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengevaluasi pelaksanaan Program Pengembangan Kecamatan Di Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal Tahun 2007 guna mengetahui sejauh mana program ini dapat mencapai tujuannya

Sedangkan kerangka teori yang digunakan antara lain adalah:

➤ Kebijakan Publik

Berbagai bentuk dan aktifitas pemerintah dalam hubungannya dengan masyarakat bisa saja dikatakan sebagai kebijakan pemerintahan. Kebijakan pemerintah itu bisa

dalam ruang lingkup yang berbeda, misalnya saja kebijakan pemerintah pusat, kebijakan pemerintah daerah maupun kebijakan pemerintah desa.

➤ Evaluasi

Evaluasi adalah kegiatan untuk menilai tingkat kinerja suatu kebijakan.<sup>1</sup> Adapun evaluasi dilakukan karena memiliki tujuan seperti dijelaskan AG. Subarsono sebagai berikut:<sup>2</sup> menentukan tingkat kinerja suatu kebijakan, mengukur tingkat efisiensi suatu kebijakan, mengukur tingkat keluaran (*outcome*) kebijakan, mengukur dampak suatu kebijakan, untuk mengetahui apabila ada penyimpangan, sebagai bahan masukan (*input*) untuk kebijakan yang akan datang.

Adapun menurut Finance (1994, hlm. 4) ada empat dasar tipe evaluasi sejalan dengan tujuan yang ingin dicapai yaitu:<sup>3</sup> evaluasi kecocokan (*appropriateness*), evaluasi efektifitas, evaluasi efisiensi, meta evaluasi

➤ Program Pengembangan Kecamatan (PPK)

Program Pengembangan Kecamatan (PPK) merupakan salah satu upaya Pemerintah Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat perdesaan, memperkuat institusi lokal, dan meningkatkan kinerja pemerintah daerah. Program Pengembangan Kecamatan yang tengah dilaksanakan di Kecamatan Suradadi mempunyai program pokok pengentasan kemiskinan melalui kegiatan pembangunan atau perbaikan sarana prasarana (infrastruktur pedesaan) dan kegiatan simpan pinjam khusus untuk perempuan telah berjalan dari tahun 2003. Program Pengembangan Kecamatan memiliki tujuan yaitu

---

<sup>1</sup>AG Subarsono, *Analisis Kebijakan Publik, Konsep, Teori dan Aplikasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005 Hal.119

<sup>2</sup> AG Subarsono, *op.cit.* Hal.120

<sup>3</sup>Abdulkahar Badjuri dan Teguh Yuwono, *Kebijakan, Konsep, dan Strategi*, Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP UNDIP, Semarang, 2003 Hal.135-136

mempercepat upaya penanggulangan kemiskinan berdasarkan pengembangan kemandirian masyarakat melalui peningkatan kapasitas masyarakat, pemerintahan lokal, serta penyediaan sarana prasarana sosial dasar dan ekonomi.

#### e. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Sedangkan tipe penelitian deskriptif evaluatif yaitu tipe penelitian yang menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu untuk menentukan frekuensi/penyebab suatu gejala lain dalam masyarakat.

Populasi dalam penelitian ini adalah semua pihak yang terlibat secara langsung dalam pelaksanaan PPK di Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal, yaitu para pelaku yang ada di tingkat kecamatan yang meliputi: Camat, Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PjOK), Penanggung jawab, Administrasi Kegiatan (PjAK), Tim Verifikasi., Unit Pengelola Kegiatan (UPK), Badan Pengawas UPK (BP-UPK), Fasilitator Kecamatan (F-Kec) dan Fasilitator Teknik Kecamatan (FT- Kec), Pendamping Lokal, Tim Pengamat, Badan Kerja sama Antar Desa (BKAD), Setrawan Kecamatan.

Penarikan sampel menggunakan *purposive sampling*. Cara penarikan sampel seperti ini digunakan untuk mencari dan mengetahui sampel yang benar-benar mengetahui dan dapat memberikan informasi yang dibutuhkan.

Teknik Pengumpulan Data dilakukan dengan Wawancara/*Interview* yaitu wawancara mendalam kepada pelaku PNPM-PPK di tingkat kecamatan yang benar-benar

terlibat dalam pelaksanaan kegiatan PNPM-PPK ini seperti ketua UPK dan Fasilitator Kecamatan, observasi, dokumentasi, dan studi pustaka.

Teknik pengolahan dalam pengolahan data ini adalah teknik pengolahan data kualitatif yaitu suatu analisa yang digunakan untuk mengolah data yang sifatnya aktual serta tidak dapat diukur dengan kata-kata. Dalam hal ini analisa data melewati empat tahapan yaitu:

1. Tahap Reduksi Data
2. Tahap Penyajian Data
3. Tahap Pemeriksaan Kesimpulan
4. Tahap Lanjut dari Kesimpulan

#### **f. Hasil Penelitian**

##### **1. Kehadiran Orang Miskin Dalam Setiap Tahapan PNPM-PPK**

Menurut Fasilitator Kecamatan (FK) Kecamatan Suaradadi, sebagian besar dari orang miskin sudah aktif dalam setiap tahapan kegiatan PNPM-PPK baik yang diselenggarakan oleh kecamatan itu sendiri maupun yang di adakan di desa namun ada beberapa hambatannya. Namun mengingat kesibukan masyarakat, tidak semua yang diundang dapat menghadiri pertemuan baik yang diadakan di desa maupun di kecamatan.<sup>4</sup>

Berikut tabel kehadiran masyarakat dalam setiap tahapan PNPM-PPK di Kecamatan Suradadi:

---

<sup>4</sup> Wawancara dengan Fasilitator Kecamatan Sdr. Hendryawan, ST, pada Hari Jumat 29 Agustus 2008

**Tabel 1.1**  
**Kehadiran Masyarakat dalam Setiap Tahapan Kegiatan PNPM-PPK Tahun 2007**

No	Jenis Kegiatan	Jumlah Kehadiran L+P	Jumlah Orang Miskin	Persentase
1	MAD I	62	0	0%
2	Musdes I	607	547	90,11%.
3	Penggalian Gagasan	2064	1961	95%
4	MKP	63	55	87,30 %
5	Musdes II	430	390	90,69 %.
6	MAD II	64	0	0%
7	MAD III	59	0	0%
8	Musdes III	305	285	93,44 %.
9	Pertanggungjawaban	175	158	90,28 %.
10	Serah Terima	153	136	88,88 %.
	Jumlah	3982	3532	

**Sumber: Laporan Bulanan PNPM-PPK Bulan Oktober 2007**

## 2. Kehadiran Kaum Perempuan dalam Setiap Kegiatan

Berikut tabel kehadiran kaum perempuan dalam setiap tahapan PNPM-PPK di Kecamatan Suradadi:

**Tabel 1.2**  
**Kehadiran Masyarakat dalam Setiap Tahapan Kegiatan PNPM-PPK Tahun 2007**

No	Jenis Kegiatan	Jumlah Kehadiran L+P	Jumlah Perempuan	Persentase
1	MAD I	62	29	46,77 %.
2	Musdes I	607	174	28,66 %
3	Penggalian Gagasan	2064	1414	68,51 %
4	MKP	63	63	100%
5	Musdes II	430	154	35,81 %
6	MAD II	64	33	51,57 %
7	MAD III	59	28	47,45 %
8	Musdes III	305	80	26,23
9	Pertanggungjawaban	175	122	69,71 %
10	Serah Terima	153	89	58,16 %.
	Jumlah	3982	2186	

**Sumber: Laporan Bulanan PNPM-PPK Bulan Oktober 2007**

## 3. Tingkat Keswadayaan Masyarakat.

### 1) Bentuk Swadaya yang Diberikan Masyarakat

Bentuk keswadayaan yang diberikan masing-masing masyarakat desa di Kecamatan Suradadi pada umumnya adalah sama yaitu berupa tenaga untuk membantu pembangunan, materi atau uang untuk membantu pembelian alat dan bahan yang dibutuhkan dalam pembangunan sarana prasarana, dan bantuan berupa makanan dan minuman sebagai konsumsi untuk para pekerja.

Adapun secara rinci bentuk swadaya dari masyarakat pada kegiatan PNPM-PPK tahun 2007 di Kecamatan Suradadi tertuang dalam tabel berikut :

**Tabel 1.3**  
**Bentuk Bantuan dan Swadaya dalam PNPM-PPK**  
**di Kec. Suradadi tahun 2007**

	Nama Desa	Kegiatan		Dimensi (m)				PNPM-PPK (Rp)	Swadaya (Rp)
		Jenis	Nama	Panjang	Lebar	Tinggi	Unit		
1	Rojongsana	SarPras	Rehab Jembatan	5	4		1	42,105,300	1,000,000
			Saluran Drainase	100	0.3		1	10,986,300	370,500
		<b>Jumlah</b>						<b>53,091,600</b>	
		Simpan Pinjam	SPP				1	10,000,000	
		<b>Sub Total</b>						<b>63,091,600</b>	
2	Suradadi	SarPras	Pengaspalan Jalan	490	2.5		1	50,755,800	1,434,000
			Pendidikan	Pelatihan Rias Manten				1	1,875,800
		<b>Jumlah</b>						<b>52,631,600</b>	
		Simpan Pinjam	SPP				3	20,526,300	
		<b>Sub Total</b>						<b>73,157,900</b>	
3	Kertasari	SarPras	Pembuatan Badan Jln	275	3		1	50,763,200	1,464,000
			Saluran Drainase	140	0.5	0.5	1	13,744,200	503,000
		<b>Jumlah</b>						<b>64,507,400</b>	
		Simpan Pinjam	SPP				2	18,000,000	
		<b>Sub Total</b>						<b>82,507,400</b>	
4	Jatimulya	SarPras	Saluran Drainase	285	0.5	0.6	1	52,684,200	481,000
			Simpan Pinjam				5	26,315,800	
		<b>Sub Total</b>						<b>79,000,000</b>	
5	Karangmulya	SarPras	Sal. Drainase/Krgmulya	300	0.5	0.5	1	58,985,300	848,500
			Sal. Drainase/Simedot	40	0.3	0.4	1	4,927,400	155,000



		<b>Jumlah</b>						<b>63,912,700</b>	
		Simpan Pinjam	SPP				1	8,947,300	
		<b>Sub Total</b>						<b>72,860,000</b>	
6	Harjasari	SarPras	Saluran Drainase	274	0.5	0.5	1	51,578,900	647,000
		Simpan Pinjam	SPP					7,894,800	
		<b>Sub Total</b>						<b>59,473,700</b>	
7	Gembongdadi	SarPras	Sal. Drainase/Cempaka	200	0.5	0.6	1	41,292,700	526,000
		N	Sal. Drainase/Ladon	150	0.3	0.4	1	21,905,300	438,500
		<b>Jumlah</b>						<b>63,198,000</b>	
		Simpan Pinjam	SPP				1	9,473,700	
		<b>Sub Total</b>						<b>72,671,700</b>	
8	Karangwuluh	SarPras	Saluran Drainase	300	0.4	0.4	1	53,684,200	954,000
			Rehab Jembatan	4	3		1	10,526,300	263,500
		<b>Jumlah</b>						<b>64,210,500</b>	
		Simpan Pinjam	SPP				2	13,157,900	
		<b>Sub Total</b>						<b>77,368,400</b>	
9	Jatibogor	SarPras	Pemb. Jembatan	4	4		1	22,105,300	3,459,300
			Pembuatan Jembatan	4	4		1	18,947,300	4,762,700
		<b>Sub Total</b>						<b>41,052,600</b>	
10	Sidaharja	SarPras	Saluran Drainase	277	0.4	0.5	1	42,021,000	376,000
		Kesehatan	WC TK	4	4		1	10,526,300	532,500
		<b>Sub Total</b>						<b>52,547,300</b>	
11	Purwahamba	SarPras	Pengaspalan Jalan	586	2.7		1	49,953,700	3,490,000
		Kesehatan	MCK	3	2.5		1	8,421,000	3,471,500
		Simpan Pinjam	SPP				2	17,894,700	
		<b>Sub Total</b>						<b>76,269,400</b>	
<b>TOTAL</b>								<b>750,000,000</b>	<b>25,177,000</b>

Sumber : Laporan Pelaksanaan PNPM-PPK Kabupaten Tegal Tahun 2007

#### 4. Dukungan Pemerintah Lokal Dalam Setiap Tahapan Kegiatan.

Peran pemerintah lokal dalam setiap tahapan PNPM-PPK sangat dibutuhkan Pemerintah lokal, seperti camat memberikan penegasan-penegasan kepada kepala desa mengenai pentingnya PNPM-PPK yang merupakan program keswadayaan. Selain itu diperlukan adanya BPD untuk memonitor setiap kegiatan yang dilaksanakan

## 5. Tingkat Pemanfaatan Bantuan

### 1) Bentuk Bantuan yang Didapatkan

Bantuan yang didapatkan oleh masyarakat di Kecamatan Suradadi adalah dalam bentuk bantuan sarana prasarana sosial dasar, bantuan ekonomi, bantuan kesehatan dan bantuan pendidikan.

Bantuan dana yang diberikan meliputi 11 desa di Kecamatan Suradadi terbagi dalam tabel perincian sebagai berikut:

**Tabel 1.4**  
**Alokasi Dana PNPM-PPK di Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal Tahun 2007**

No	Desa	Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan	Kegiatan Fisik (Infrastruktur)	Total Dana PNPM-PPK
1	Bojongsana	10.000.000	53.091.600	63.091.600
2	Suradadi	20.526.300	52.631.600	73.157.900
3	Kertasari	18.000.000	64.507.400	82.507.400
4	Jatimulya	26.315.800	52.684.200	79.000.000
5	Karangmulya	8.947.300	63.912.700	72.860.000
6	Harjasari	7.894.800	51.578.900	59.473.700
7	Gembongdadi	9.473.700	63.198.000	72.671.700
8	Karangwuluh	13.157.900	64.210.500	77.368.400
9	Jatibogor	----	41.052.600	41.052.600
10	Sidharja	----	52.547.300	52.547.300
11	Purwahamba	17.894.700	58.374.700	76.269.400
	Jumlah	132.210.500	617.789.500	750.000.000

**Sumber : Laporan Pelaksanaan PNPM-PPK Kabupaten Tegal Tahun 2007**

Sedangkan untuk jenis dan bentuk bantuan yang di dapatkan dari PNPM-PPK di Kecamatan Suradadi adalah sebagai berikut:

**Tabel 1.5**  
**Jenis dan Bantuan PNPM-PPK di Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal Tahun 2007**

No	Desa	Jenis Bantuan	Bentuk Bantuan
1	Bojongsana	➤ Bantuan Fisik (Infrastruktur)	• Rehab Jalan • Saluran Drainase
		➤ Simpan Pinjam Khusus Perempuan	• Tambahan Modal Usaha
2	Suradadi	➤ Bantuan Fisik (Infrastruktur)	• Pengaspalan Jalan

		<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Pendidikan</li> <li>➤ Simpan Pinjam Khusus Perempuan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelatihan Rias Penganten</li> <li>• Tambahan Modal Usaha</li> </ul>
3	Kertasari	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Bantuan Fisik (Infrastruktur)</li> <li>➤ Simpan Pinjam Khusus Perempuan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembuatan Badan Jalan</li> <li>• Saluran Drainase</li> <li>• Tambahan Modal Usaha</li> </ul>
4	Jatimulya	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Bantuan Fisik (Infrastruktur)</li> <li>➤ Simpan Pinjam Khusus Perempuan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Saluran Drainase</li> <li>• Tambahan Modal Usaha</li> </ul>
5	Karangmulya	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Bantuan Fisik (Infrastruktur)</li> <li>➤ Simpan Pinjam Khusus Perempuan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Saluran Drainase/ Karangmulya</li> <li>• Saluran Drainase/ Simendot</li> <li>• Tambahan Modal Usaha</li> </ul>
6	Harjasari	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Bantuan Fisik (Infrastruktur)</li> <li>➤ Simpan Pinjam Khusus Perempuan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Saluran Drainase</li> <li>• Tambahan Modal Usaha</li> </ul>
7	Gembongdadi	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Bantuan Fisik (Infrastruktur)</li> <li>➤ Simpan Pinjam Khusus Perempuan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Saluran Drainase/ Cempaka</li> <li>• Saluran Drainase/Ladon</li> <li>• Tambahan Modal Usaha</li> </ul>
8	Karangwuluh	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Bantuan Fisik (Infrastruktur)</li> <li>➤ Simpan Pinjam Khusus Perempuan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Saluran Drainase</li> <li>• Rehab Jembatan</li> <li>• Tambahan Modal Usaha</li> </ul>
9	Jatibogor	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Bantuan Fisik (Infrastruktur)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembangunan Jembatan</li> <li>• Pembuatan Jembatan</li> </ul>
10	Sidharja	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Bantuan Fisik (Infrastruktur)</li> <li>➤ Kesehatan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Saluran Drainase</li> <li>• Pembangunan MCK</li> </ul>
11	Purwahamba	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Bantuan Fisik (Infrastruktur)</li> <li>➤ Kesehatan</li> <li>➤ Simpan Pinjam Khusus Perempuan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengaspalan Jalan</li> <li>• Pembuatan MCK</li> <li>• Tambahan Modal Usaha</li> </ul>

**Sumber : Laporan Pelaksanaan PNPM-PPK Kabupaten Tegal Tahun 2007**

**2) Kemanfaatan Bantuan Sarana Prasarana**

Dengan adanya bantuan sarana prasarana ekonomi dasar sangat dirasakan kemanfaatannya oleh masyarakat desa

Dengan adanya bantuan berupa sarana prasarana dan ekonomi, bagi masyarakat khususnya orang-orang miskin sangat dirasakan kemanfaatannya. Karena mereka menjadi bisa berpenghasilan kembali dengan memanfaatkan bantuan dari PNPM-PPK. Sehingga dapat dikatakan bahwa PNPM-PPK telah berjalan dengan sangat efektif apabila dilihat dari segi kemanfaatan bantuan sarana prasarana bagi masyarakat.

### **3) Kemanfaatan Bantuan Ekonomi**

Pemanfaatan bantuan ekonomi yang diberikan oleh PNPM-PPK bagi masyarakat miskin terutama perempuan adalah untuk tambahan modal usaha guna memberikan tambahan penghasilan mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari agar bisa mensejahterakan kehidupan keluarga.

Dengan data tersebut dapat disimpulkan bahwa kegiatan PNPM-PPK sudah berjalan dengan sangat efektif apabila dilihat dari tingkat kemanfaatan bantuan ekonomi oleh masyarakat.

## **6. Keberlanjutan dan Pengembangan Fasilitas Sarana Prasarana Sosial Dasar , Kesehatan dan Ekonomi.**

### **1) Kondisi Sarana Prasarana dan Bantuan Kesehatan**

Menurut Sdr. Hendryawan, ST bahwa di wilayah Kecamatan Suradadi untuk keberlanjutan dan pengembangan fasilitas sarana dan prasarana sosial dasar masih

rendah, karena kesadaran masyarakat kurang Hanya sekitar 50 % sarana prasarana yang masih terlihat ada perawatan.<sup>5</sup>

## **2) Kondisi Bantuan Ekonomi**

Menurut Ketua UPK Kecamatan Suradadi sebagian usaha yang mendapat modal dari PNPM-PPK telah berkembang *Sedangkan untuk keberlanjutan dari bantuan ekonomi baik SPP maupun UEP yang digunakan untuk tambahan modal usaha, dengan perincian 55 % usaha berkembang, 10 % bangkrut dan sisanya 35 % dalam keadaan stagnan atau masih berjalan tetapi tidak mengalami perkembangan yang berarti.*<sup>6</sup>

## **7. Tingkat Kesehatan UPK dalam Pengelolaan Dana Bergulir.**

### **1) Ketepatan Dana Bergulir Bagi Kelompok**

Dalam proses perguliran dana bagi kelompok sudah berjalan sebagaimana mestinya. Kesimpulan yang dapat diambil adalah bahwa PNPM-PPK sudah berjalan dengan sangat efektif karena ketepatan perguliran dana mencapai 90 % dan sudah berjalan sesuai dengan prosedur yang ada.

### **2) Ketepatan Pembayaran Angsuran Kelompok**

Menurut Ketua UPK Kecamatan Suradadi 90% pembayaran sudah lancar dan tepat waktu.

Dengan demikian berdasarkan data dan uraian di atas maka dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa kegiatan PNPM-PPK di Kecamatan Suradadi sudah sangat

---

<sup>5</sup> Wawancara dengan Fasilitator Kecamatan Sdr. Hendryawan, ST, pada Hari Jumat 29 Agustus 2008

<sup>6</sup> Wawancara dengan Ketua UPK Kecamatan Suradadi Sdr. Heri Purwanto, AMd TK, pada Hari Jumat 29 Agustus 2008

efektif apabila dikaitkan dengan ketepatan pembayaran angsuran kelompok, mengingat ketepatan pembayaran kelompok mencapai 90 %.

#### **g. Pembahasan**

Secara keseluruhan proses pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Pengembangan Kecamatan (PNPM-PPK) di Kecamatan Suradadi ini sudah cukup berhasil dari tahap proses perencanaan, pelaksanaan maupun pelestarian.

Berikut rincian indikator-indikator yang menunjukkan tingkat keberhasilan dan ketidakberhasilan atau kurangberhasilan:

##### **a. Indikator yang sudah menunjukkan keberhasilan**

1. Kehadiran Orang Miskin dalam Setiap Kegiatan, yang meliputi: Musyawarah Desa I, Penggalan Gagasan, Musyawarah Khusus Perempuan, Musyawarah Desa II, Musyawarah Desa III, Musyawarah Desa Pertanggungjawaban, Musyawarah Desa Serah Terima
2. Kehadiran Kaum Perempuan dalam Setiap Kegiatan, yang meliputi: Musyawarah Antar Desa I (MAD I) sebesar 46,77%, Penggalan Gagasan sebesar 68,51 %, Musyawarah Khusus Perempuan 63 orang, Musyawarah Antar Desa II (MAD) II sebanyak 51,57%, Musyawarah Antar Desa III (MAD III) sebanyak 47,45%, Musyawarah Desa Pertanggungjawaban sebanyak 69,71%, Musyawarah Desa Serah Terima sebanyak 58,16%  
  
Kehadiran kaum perempuan dapat dikatakan efektif apabila kehadiran perempuan telah mencapai 40% dari total peserta yang menghadiri forum.
3. Tingkat Keswadayaan Masyarakat

Untuk keberhasilan dalam indikator keswadayaan masyarakat ini bisa dilihat dari antusiasme masyarakat setiap desa di Kecamatan Suradadi dalam memberikan sumbangan dalam bentuk tenaga maupun materi.

#### 4. Dukungan Pemerintah Lokal

Dalam pelaksanaan PNPM-PPK di Kecamatan Suradadi dukungan pemerintah lokal yang terlibat sangat besar sesuai dengan fungsi masing-masing.

#### 5. Tingkat Pemanfaatan Bantuan, yang meliputi:

##### ➤ Bantuan yang didapatkan

Bantuan yang didapatkan antara oleh setiap desa adalah berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan masing-masing desa dan dilihat juga dari tingkat kepentingannya. Bantuan yang didapatkan antara lain: bantuan ekonomi berupa Simpan pinjam perempuan (SPP), bantuan sarana prasarana yang berupa pengaspalan jalan, pembuatan dan perbaikan jembatan, pembuatan saluran air/drainase dan MCK, untuk bantu bantuan pendidikan non formal dan pelatihan diwujudkan dalam pelatihan rias pengantin.

##### ➤ Pemanfaatan bantuan sarana prasarana

Masyarakat telah memanfaatkan bantuan sarana prasarana yang didapatkan sebagai akses dalam menjalankan roda perekonomian.

##### ➤ Pemanfaatan bantuan ekonomi

Pemanfaatan bantuan ekonomi sudah sangat efektif dalam penggunaannya karena 90% dana digunakan untuk modal usaha guna menambah penghasilan.

#### 6. Tingkat Kesehatan UPK dalam Pengelolaan Dana Bergulir

Ketepatan dalam perguliran dana baik dari UPK kepada kelompok penerima telah sesuai dengan prosedur yang ada. Sementara itu ketepatan pembayaran dari kelompok peminjam kepada UPK sudah 90% lancar dan tepat waktu.

b. Indikator yang belum berhasil

1. Kehadiran Orang Miskin dalam Setiap Kegiatan, yang meliputi:

- Musyawarah Antar Desa I (MAD I), Musyawarah Antar Desa II (MAD II), Musyawarah Antar Desa III (MAD III)

Pada MAD I, MAD II dan MAD III tidak dihadiri peserta perwakilan dari orang miskin sama sekali hal ini disebabkan dalam MAD dibutuhkan orang-orang yang pandai berbicara dalam forum. Keadaan yang demikian ini tentu saja sangat bertolak belakang dengan salah satu prinsip dasar PNPM-PPK yaitu keberpihakan pada orang miskin.

2. Kehadiran Kaum Perempuan dalam Setiap Kegiatan, yang meliputi:

Musyawarah Desa I, karena jumlah peserta perempuan hanya sebesar 28,66%, musyawarah Desa II Forum ini dihadiri oleh 35,81% kaum perempuan. Kehadiran kaum perempuan dalam kedua forum ini belum cukup terwakilkan karena belum mencapai 40% dari total peserta hadir.

3. Keberlanjutan dan Perkembangan Fasilitas Sarana Prasarana, Kesehatan dan Ekonomi

Ketiadaan kesadaran masyarakat untuk bersama-sama memelihara bantuan yang telah diberikan membuat kondisi bantuan sarana prasarana dan kesehatan (MCK) hanya 50% yang masih terlihat adanya perawatan. Begitu juga dengan keadaan



bantuan ekonomi yang mengalami hal serupa, meskipun tingkat pemanfaatan dana sangat tinggi namun tingkat keberlanjutannya masih rendah yaitu sebesar 55% usaha yang berkembang.

Namun sebagian keberhasilan PNPM-PPK hanya terlihat dari cara-cara atau tujuan-tujuan khusus untuk mencapai tujuan utamanya saja. Sementara itu tujuan utama dari PNPM-PPK yaitu mempercepat penanggulangan kemiskinan kurang berhasil karena usaha-usaha yang mendapatkan modal dari PNPM-PPK hanya 55% saja yang berkembang sedangkan sisanya tidak berkembang karena tidak bisa mengelola dengan baik bantuan yang telah diberikan. Dengan demikian hanya sebagian masyarakat miskin yang dapat memanfaatkan bantuan sebagaimana mestinya sehingga dapat meningkatkan penghasilan mereka.

## **h. Penutup**

### **➤ Kesimpulan**

Dari hasil penelitian PNPM-PPK di Kecamatan Suradadi tersebut dapat diambil beberapa kesimpulan mendasar yaitu:

1. Keterlibatan orang miskin dalam sebagian kecil tahapan kegiatan khususnya dalam forum yang melibatkan antar desa seperti musyawarah antar desa, tidak ada sama sekali. Hal ini tentu sangat bertolak belakang dengan prinsip dasar PNPM-PPK yaitu keberpihakan pada orang miskin. Namun dalam forum yang lain seperti musyawarah yang diadakan pada tingkat desa, kehadiran dan antusiasme orang miskin sangat besar.
2. Kehadiran kaum perempuan dalam sebagian besar tahapan kegiatan sudah terwakilkan yaitu mencapai angka rata-rata 63,17%. Angka ini telah memenuhi syarat kehadiran perempuan yaitu minimal 40 % kehadiran.

3. Masih kurangnya jumlah bantuan pendidikan (pendidikan non formal), hanya ada satu desa saja yang mendapatkannya yaitu berupa pelatihan rias pengantin.
4. Tidak terpeliharanya bantuan sarana prasarana sosial dasar yang diberikan karena kurangnya rasa saling memiliki di masyarakat terhadap hasil produk bantuan.
5. Sebagian kecil warga tidak mampu mengembangkan usaha ekonominya karena adanya sebagian kecil warga yang menyalahgunakan bantuan keuangan, seperti untuk kebutuhan konsumtif saja.
6. Tidak adanya aturan yang pasti mengenai tindakan/sanksi tertentu yang diberlakukan untuk mengatasi atau menyelesaikan keterlambatan pembayaran angsuran kelompok.

➤ **Saran**

1. Dalam setiap tahapan kegiatan sebaiknya keikutsertaan orang miskin diprioritaskan terutama dalam forum yang melibatkan warga antar desa.
2. Meningkatkan atau memperbanyak bantuan pendidikan yang jumlahnya masih sangat terbatas.
3. Masyarakat desa diberi pemahaman tentang pentingnya tanggung jawab dalam pemeliharaan hasil keluaran program seperti sarana prasarana, dengan cara menumbuhkan rasa saling memiliki terhadap bantuan yang telah didapatkan.
4. Sebaiknya setiap desa mempunyai peraturan desa (Perdes) yang mengatur tentang pemeliharaan hasil PNPM-PPK. Atau sebaiknya ada dana khusus baik dari PNPM-PPK maupun dana dari swadaya masyarakat dalam rangka pemeliharaan sarana prasarana.

5. Memberi pengarahan kepada para penerima bantuan bahwa dana yang di dapatkan adalah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat secara berkelanjutan.
6. Pemerintah lokal sebaiknya menganalisa jenis usaha yang cocok untuk Kecamatan Suradadi karena tidak semua orang miskin memiliki usaha.
7. Perlu adanya mekanisme *reward and punishment*, yaitu pemberian penghargaan maupun hukuman.
8. Pemerintah harus tetap bisa mempertahankan eksistensi dari PNPM-PPK agar tetap berjalan secara berkelanjutan..

**i. Daftar Rujukan**

Badjuri, Abdulkahar dan Teguh Yuwono, 2003, *Kebijakan, Konsep, dan Strategi*, Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Undip, Semarang.

Subarsono, AG, 2005, *Analisis Kebijakan Publik, Konsep, Teori dan Aplikasi*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar

Tim Koordinasi PNPM-PPK, 2007, *Petunjuk Teknis Operasional PNPM-PPK*, Jakarta, Depdagri.

TP PNPM-PPK Kecamatan Suradadi, 2007, *Laporan Bulanan PNPM-PPK Bulan Oktober 2007*, Tegal.